

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan merupakan komponen strategis dalam sistem pendidikan karena berperan sebagai pusat sumber belajar, pengembangan literasi, serta pembentukan karakter peserta didik. Fungsinya telah berkembang dari sekadar tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka menjadi ruang pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, perpustakaan tidak hanya menjadi pelengkap fasilitas pendidikan, melainkan juga sebagai salah satu penentu keberhasilan proses belajar mengajar yang berkelanjutan.

Di era transformasi digital saat ini, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan, termasuk perpustakaan, semakin kompleks. Teknologi informasi telah membuka akses seluas-luasnya terhadap sumber pengetahuan, namun pada saat yang sama menuntut adanya tanggung jawab dan kedisiplinan dari para pemustaka dalam menggunakan fasilitas tersebut. Tanpa adanya kedisiplinan, maka segala bentuk layanan, inovasi, dan sumber daya informasi yang tersedia tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Ketidakteraturan dalam penggunaan fasilitas perpustakaan berpotensi menurunkan kualitas layanan dan mengganggu keberlangsungan fungsi perpustakaan sebagai ruang publik yang edukatif.

Kedisiplinan pemustaka menjadi aspek fundamental dalam menjaga tertibnya layanan perpustakaan. Penerapan aturan dan tata tertib bukan semata

untuk menciptakan keteraturan administratif, melainkan sebagai sarana edukatif dalam membentuk perilaku bertanggung jawab. Dalam pandangan Islam, kedisiplinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencarian ilmu. Ajaran-ajaran Islam secara eksplisit mengajarkan nilai-nilai seperti amanah, tanggung jawab, ketertiban, dan etika dalam menuntut ilmu.¹ Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 49 menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, yang tentu saja mensyaratkan adanya ketekunan dan kedisiplinan dalam proses tersebut.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan perilaku tidak disiplin di kalangan pemustaka, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi meliputi keterlambatan pengembalian buku, kehilangan koleksi, kerusakan fasilitas, hingga pelanggaran tata tertib ruang baca. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ditetapkan oleh perpustakaan dengan perilaku aktual pengguna layanan. Kesenjangan ini harus ditanggapi secara serius melalui pendekatan manajerial yang tepat, salah satunya adalah dengan menerapkan sanksi administratif sebagai upaya preventif sekaligus kuratif terhadap perilaku indiscipliner.

Sanksi administratif merupakan bentuk tindakan non-fisik yang diberikan kepada pemustaka yang melanggar ketentuan perpustakaan. Jenis sanksi ini dapat berupa teguran lisan, pembatasan akses layanan, hingga pengenaan denda tertentu.

¹Eny Supriati, "Manajemen Perpustakaan dalam Mendukung Gerakan Literasi Digital di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 201–218.

Penerapan sanksi administratif memiliki dua tujuan utama, "yaitu sebagai instrumen penegakan aturan dan sebagai sarana pembinaan untuk menanamkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas umum." Efektivitas dari sanksi ini bergantung pada konsistensi pelaksanaannya, pemahaman pemustaka terhadap konsekuensi pelanggaran, serta dukungan dari sistem sosialisasi informasi yang memadai.²

Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin telah menerapkan berbagai bentuk sanksi administratif terhadap siswa yang melanggar peraturan perpustakaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya manajemen perpustakaan dalam menciptakan lingkungan literasi yang tertib dan kondusif. Namun, meskipun sanksi telah diberlakukan, berbagai bentuk pelanggaran seperti keterlambatan pengembalian buku, ketidakteraturan prosedur peminjaman, dan kurangnya etika penggunaan ruang baca masih kerap ditemukan. "Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam efektivitas penerapan sanksi yang seharusnya menjadi solusi atas masalah kedisiplinan pemustaka."³

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat diukur hanya dari keberadaannya di atas kertas, tetapi perlu ditinjau dari pelaksanaannya secara nyata di lapangan. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan sanksi administratif menjadi sangat penting, mengingat kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ketertiban teknis layanan perpustakaan, tetapi juga pada

²Yesy Kusumawati dan Rini Ratna Nafita Sari, "Analisis Aturan Sanksi Keterlambatan dan Menghilangkan Bahan Pustaka Perpustakaan SMA Negeri di Kota Kediri," *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 1–10.

³Endang Fatmawati, *Layanan Perpustakaan Sekolah: Panduan Bagi Pemula* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 213.

pembentukan budaya disiplin siswa secara keseluruhan. “Sanksi administratif yang diterapkan dengan adil, konsisten, komunikatif akan berkontribusi terhadap terciptanya pemustaka yang tidak hanya patuh, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sosialnya dalam memanfaatkan fasilitas umum secara etis”.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi administratif dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan disipliner dengan perilaku pemustaka, serta menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan perpustakaan yang lebih edukatif, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

Perpustakaan merupakan komponen strategis dalam sistem pendidikan karena berperan sebagai pusat sumber belajar, pengembangan literasi, serta pembentukan karakter peserta didik. Fungsinya telah berkembang dari sekadar tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka menjadi ruang pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, perpustakaan tidak hanya menjadi pelengkap fasilitas pendidikan, melainkan juga sebagai salah satu penentu keberhasilan proses belajar mengajar yang berkelanjutan.

Di era transformasi digital saat ini, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan, termasuk perpustakaan, semakin kompleks. Teknologi informasi telah

⁴I. Ketut Artana, “Upaya Mengoptimalkan Peran Perpustakaan Sekolah melalui Pengelolaan yang Profesional,” *ACARYA PUSTAKA* 6, no. 1 (2019): hlm. 3–4. <https://doi.org/10.23887/ap.v6i1.22181>.

membuka akses seluas-luasnya terhadap sumber pengetahuan, namun pada saat yang sama menuntut adanya tanggung jawab dan kedisiplinan dari para pemustaka dalam menggunakan fasilitas tersebut.⁵ Tanpa adanya kedisiplinan, maka segala bentuk layanan, inovasi, dan sumber daya informasi yang tersedia tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Ketidakteraturan dalam penggunaan fasilitas perpustakaan berpotensi menurunkan kualitas layanan dan mengganggu keberlangsungan fungsi perpustakaan sebagai ruang publik yang edukatif.

Kedisiplinan pemustaka menjadi aspek fundamental dalam menjaga tertibnya layanan perpustakaan. Penerapan aturan dan tata tertib bukan semata untuk menciptakan keteraturan administratif, melainkan sebagai sarana edukatif dalam membentuk perilaku bertanggung jawab. Dalam pandangan Islam, kedisiplinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencarian ilmu. Ajaran-ajaran Islam secara eksplisit mengajarkan nilai-nilai seperti amanah, tanggung jawab, ketertiban, dan etika dalam menuntut ilmu. Firman Allah dalam Surah Al- Maidah ayat 49 menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, yang tentu saja mensyaratkan adanya ketekunan dan kedisiplinan dalam proses tersebut.

dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan perilaku tidak disiplin di kalangan pemustaka, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi meliputi keterlambatan pengembalian buku, kehilangan koleksi, kerusakan fasilitas, hingga pelanggaran tata tertib ruang baca. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang

⁵ H. Inci Önal, "IFLA/UNESCO School Library Manifesto for Creating One World," *Libri* 59, no. 1 (1 Maret 2009): hlm 45–54, <https://doi.org/10.1515/libr.2009.005>.

ditetapkan oleh perpustakaan dengan perilaku aktual pengguna layanan. Kesenjangan ini harus ditanggapi secara serius melalui pendekatan manajerial yang tepat, salah satunya adalah dengan menerapkan sanksi administratif sebagai upaya preventif sekaligus kuratif terhadap perilaku indisipliner.

Sanksi administratif merupakan bentuk tindakan non-fisik yang diberikan kepada pemustaka yang melanggar ketentuan perpustakaan. Jenis sanksi ini dapat “berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan akses layanan, hingga pengenaan denda tertentu.” Penerapan sanksi administratif memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai instrumen penegakan aturan dan sebagai sarana pembinaan untuk menanamkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas umum. Efektivitas dari sanksi ini bergantung pada konsistensi pelaksanaannya, pemahaman pemustaka terhadap konsekuensi pelanggaran, serta dukungan dari sistem sosialisasi informasi yang memadai.⁶

Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin telah menerapkan berbagai bentuk sanksi administratif terhadap siswa yang melanggar peraturan perpustakaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya manajemen perpustakaan dalam menciptakan lingkungan literasi yang tertib dan kondusif. Namun, meskipun sanksi telah diberlakukan, berbagai bentuk pelanggaran seperti keterlambatan pengembalian buku, ketidakteraturan prosedur peminjaman, dan kurangnya etika penggunaan ruang baca masih kerap ditemukan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam efektivitas penerapan sanksi yang

⁶Risky Wahyuni, *Penerapan Sanksi Administratif terhadap Kedisiplinan Pemustaka di Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2019), hlm. 45–46.

seharusnya menjadi solusi atas masalah kedisiplinan pemustaka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat diukur hanya dari keberadaannya di atas kertas, tetapi perlu ditinjau dari pelaksanaannya secara nyata di lapangan. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan sanksi administratif menjadi sangat penting, mengingat kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ketertiban teknis layanan perpustakaan, tetapi juga pada pembentukan budaya disiplin siswa secara keseluruhan. Sanksi administratif yang diterapkan dengan adil, konsisten, dan komunikatif akan berkontribusi terhadap terciptanya pemustaka yang tidak hanya patuh, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sosialnya dalam memanfaatkan fasilitas umum secara etis.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi administratif dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan disipliner dengan perilaku pemustaka, serta menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan perpustakaan yang lebih edukatif, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

Dalam islam, kedisiplinan juga merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari proses menuntut ilmu. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Ayat dari surah ini menjelaskan tentang perlunya menegakkan hukum Allah dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah diperbuatnya. Ini menunjukkan bahwa sanksi dapat diterapkan dan menjadi bagian dari penegak hukum Allah dalam berbagai aspek pengelolaan kedisiplinan pemustaka dalam menjaga bahan koleksi.

Juga di surah ini mengajarkan pentingnya keadilan, konsistensi dalam penegakan hukum. Ayat ini juga menjadi landasan dasar awal etika dalam menetapkan dan menjalani sanksi administratif terhadap pelanggaran disiplin pemustaka dalam pengembalian koleksi dan juga menjaga bahan koleksi, agar layanan berjalan tertib, adil, dan profesional.

Ayat Surah Al-Ma'idah ayat 49 menegaskan perintah untuk menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah serta larangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan. Dalam tafsir para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, objektif, dan konsisten tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu. Selain itu, terdapat peringatan agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang berupaya menyimpangkan hukum dari ketentuan yang benar. Apabila terdapat penolakan terhadap hukum tersebut, maka hal itu merupakan konsekuensi dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh pelanggarnya.

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi, ayat ini memberikan prinsip dasar bahwa setiap pelanggaran harus memiliki konsekuensi sebagai bentuk keadilan dan upaya menjaga ketertiban. Sanksi tidak hanya dimaknai sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan agar individu lebih disiplin dan

bertanggung jawab. karena itu, penerapan sanksi harus didasarkan pada aturan yang jelas, dilakukan secara adil tanpa diskriminasi, serta diterapkan secara konsisten kepada setiap pelanggar.

Dalam konteks pengelolaan perpustakaan, prinsip ini dapat diterapkan dalam bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran disiplin pemustaka, seperti keterlambatan pengembalian koleksi, kerusakan, atau kehilangan bahan pustaka. Penerapan sanksi tersebut harus didukung oleh bukti yang jelas, seperti data peminjaman dan pencatatan administrasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Demikian, sanksi yang diberikan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan menjadi bagian dari upaya menciptakan layanan perpustakaan yang tertib, adil, dan profesional.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka istilah-istilah dalam judul penelitian dijabarkan secara operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat keberhasilan penerapan sanksi administratif dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu bagaimana efektifitas sanksi administratif dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka di MAN 2 Kota Banjarmasin.

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah bentuk hukuman non-fisik yang diberlakukan kepada pemustaka yang melanggar peraturan perpustakaan. Dalam konteks penelitian ini⁷, sanksi administratif meliputi :

- a. Teguran lisan atau tertulis,
- b. Pembatasan hak layanan (misalnya tidak boleh meminjam buku sementara waktu),
- c. Denda keterlambatan pengembalian buku.

3. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah perilaku tertib dan taat aturan yang ditunjukkan oleh pengguna perpustakaan dalam mengikuti tata tertib yang berlaku, seperti:

- a. Mengembalikan buku tepat waktu,
- b. Tidak merusak fasilitas atau koleksi,
- c. Tidak membuat kegaduhan di ruang baca, dan
- d. Mengikuti prosedur peminjaman dan pengembalian secara benar.
- e. Kedisiplinan ini akan diukur berdasarkan catatan pelanggaran, frekuensi
- f. keterlambatan, serta pengamatan dan penilaian pustakawan.

4. Pemustaka

Pemustaka yang dimaksud adalah siswa-siswi MAN 2 Kota Banjarmasin yang secara aktif menggunakan layanan perpustakaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Fokus penelitian akan ditujukan pada siswa sebagai kelompok pemustaka utama.

⁷ Wismanawati, Riski Tri. 2013. Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka terhadap Kedisiplinan Pemustaka. Jurnal Ilmu Perpustakaan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Efektifitas sanksi administratif dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sanksi administratif.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi administratif dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sanksi administratif di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin.

E. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis di harapkan penelitian ini dapat berguna bagi siswa dan siswi sebagai referensi dan menambah pengetahuan terkait sanksi administratif di perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin.
2. Secara Praktis penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan dan evaluasi kepada pengelola Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin dalam mengembangkan strategi peningkatan kedisiplinan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam konteks penelitian, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang mendekati tema penelitian, oleh karena itu peneliti meneliti dan mengkaji masalah untuk menemukan substansi masalah yang berbeda dari topik yang akan peneliti angkat, antara lain :

1. Skripsi dari Armiami yang berjudul : “Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pemustaka Di Perpustakaan Universitas Negeri Padang”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan sanksi administratif terkait keterlambatan pengembalian bahan pustaka, “faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan tersebut, dampak, penerapan sanksi administratif serta cara cara mengatasi masalah keterlambatan pengembalian di perpustakaan Universitas Negeri Padang’ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh dari beberapa informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif telah berjalan dengan baik, berkat kerjasama antara pegawai perpustakaan dan mahasiswa UNP dalam menjalankan prosedur yang berlaku. Namun, Perpustakaan UNP belum melaksanakan sosialisasi secara optimal, sehingga masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui tata tertib dan ketentuan sanksi yang ada. Sosialisasi yang dilakukan saat ini hanya melalui pemasangan banner dan pembuatan website. Mahasiswa UNP belum menunjukkan perubahan perilaku untuk menghindari keterlambatan dalam pengembalian buku, dan masih banyak yang terlambat. Faktor-faktor yang

menyebabkan keterlambatan pengembalian buku antara lain: 1) lupa tanggal jatuh tempo, 2) buku yang masih dibutuhkan, 3) pulang kampung, 4) jadwal kuliah yang padat, 5) meminjamkan kartu mahasiswa (KTM) kepada teman yang lupa mengembalikan buku, 6) buku dipinjam oleh teman, dan 7) banyak tugas yang harus diselesaikan. Sanksi administratif yang diterapkan belum memberikan efek jera kepada mahasiswa UNP. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara perpustakaan UNP dan mahasiswa untuk mengatasi keterlambatan buku.⁸

2. Skripsi dari Yesy Kusumawati Dan Rini Ratna Nafita Sari yang berjudul: “Analisis Aturan Sanksi Keterlambatan dan Menghilangkan Bahan Pustaka Perpustakaan SMA Negeri di Kota Kediri”. Pemberian sanksi atas keterlambatan pengembalian buku dan kehilangan buku merupakan salah satu cara untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan bahan pustaka. Sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera, sehingga peminjam tidak mengulangi kesalahan yang sama. “Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: 1) menganalisis sanksi keterlambatan pengembalian buku, dan 2) menganalisis sanksi untuk kehilangan buku di perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Kediri.” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang dilaksanakan di lima SMA Negeri di Kota Kediri, yaitu SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 7, dan SMAN 8. Hasil analisis menunjukkan bahwa di perpustakaan SMA Negeri Kota Kediri, penerapan sanksi keterlambatan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Perguruan Tinggi Depdikbud 2004. Sanksi yang diberikan meliputi pembayaran denda serta sanksi administratif yang melarang peminjam untuk

⁸Armiati dan Komala Zuha, “Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang,” *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)* 4, no. 1 (2019): hlm 1-10.

meminjam buku lagi. Di SMA Negeri 8, selain sanksi denda, juga diterapkan sanksi sosial, di mana peminjam dapat mengganti denda dengan kompensasi waktu untuk membantu dalam pengelolaan perpustakaan. Sedangkan untuk sanksi kehilangan koleksi di lima SMA Negeri tersebut, aturan yang mewajibkan peminjam mengganti buku dengan judul yang sama sudah sesuai dengan Buku Panduan Perpustakaan STIKOM Surabaya. Namun, peneliti belum menemukan teori yang mendukung sanksi yang mengganti dengan kompensasi pembayaran. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan sanksi yang tepat untuk meningkatkan disiplin peminjam dan menjaga kelangsungan pengelolaan perpustakaan.⁹

3. Skripsi dari Rahmatiani (2023) berjudul: “Kompetensi Manajerial Pustakawan dalam Pengelolaan Program Literasi Sekolah di MIN 11 Banda Aceh” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi manajerial pustakawan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program literasi di lingkungan madrasah. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan memiliki peran penting dalam mendukung program literasi, khususnya melalui kegiatan pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran, serta penyediaan lingkungan yang mendukung literasi seperti pojok baca dan perpustakaan kelas.” Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala dalam pengelolaan, antara lain kurangnya pustakawan profesional, keterbatasan anggaran, serta belum tersedianya jam khusus untuk

⁹Yesy Kusumawati dan Rini Ratna Nafita Sari, “Analisis Aturan Sanksi Keterlambatan dan Menghilangkan Bahan Pustaka Perpustakaan SMA Negeri di Kota Kediri,” *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)* 3, no. 3 (2015): hlm 1–10.

pelaksanaan program literasi di perpustakaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program literasi¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari subbab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan

Bab II Kajian Teori, bab ini membahas tentang teori disiplin, teori sanksi administratif, model kepatuhan pemustaka, pengaruh sosial terhadap disiplin, efek jera dari sanksi, faktor penyebab keterlambatan.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup, bab ini meliputi dari kesimpulan dan saran.

¹⁰ Rahmatiani, Kompetensi Manajerial Pustakawan dalam Pengelolaan Program Literasi Sekolah di MIN 11 Banda Aceh (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), hlm. 63–68.